

BULETIN

# BIOENERGI

Edisi 2 - November 2016



**MEWASPADAI  
OVERSUPPLAI  
BIODIESEL**

**Penanggung Jawab**

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI)

**Dewan Redaksi**

Pengurus APROBI

**Alamat Redaksi**

 Multivision Tower, Lantai 11,  
 Jl Kuningan Mulia Lot 9B

Buletin ini diterbitkan oleh  
 Asosiasi Produsen Biofuels  
 Indonesia (APROBI)



Redaksi menerima kiriman artikel opini, naskah berita, foto, dan karikatur. Naskah bisa dikirimkan melalui pos ke Alamat Redaksi atau melalui email: [aprobi@ymail.com](mailto:aprobi@ymail.com). Redaksi berhak mengedit dan mengubah tulisan tanpa mengubah makna dari tulisan tersebut.

## Biofuelpedia

**Solar** adalah salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi, pada dasarnya minyak mentah dipisahkan fraksi-fraksinya pada proses destilasi sehingga dihasilkan fraksi solar dengan titik didih 250°C sampai 300°C. Kualitas solar dinyatakan dengan bilangan cetane (pada bensin disebut oktan), yaitu bilangan yang menunjukkan kemampuan solar mengalami pembakaran di dalam mesin serta kemampuan mengontrol jumlah ketukan (knocking), semakin tinggi bilangan cetane ada solar maka kualitas solar akan semakin bagus.

(Sumber: [www.prosesindustri.com](http://www.prosesindustri.com))

# Komitmen Produsen Terhadap Mandatori

Pembaca yang terhormat, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) kembali menerbitkan buletin triwulan yang pertama kali terbit pada Juli 2016. Tujuan penerbitan buletin untuk memberikan informasi terkini perihal industri biofuel di dalam negeri.

Kalangan produsen biodiesel domestik menyambut gembira keluarnya keputusan Menteri ESDM mengenai pengadaan biodiesel bersubsidi periode November 2016-April 2017. Jumlah pengadaan biodiesel meningkat menjadi 1,53 juta ton dibandingkan periode sebelumnya Mei 2016-Oktober 2016 berjumlah 1,51 juta ton.

Dalam Rubrik Laporan Utama, kami mengulas capaian tiga produsen biodiesel dalam merealisasikan penyaluran biodiesel sepanjang enam bulan kemarin. Mereka adalah PT Cemerlang Energi Perkasa, PT LDC Indonesia, dan PT Tunas Baru Lampung Tbk. Masing-masing perusahaan punya strategi supaya pasokan biodiesel ke Pertamina pada khususnya tetap berjalan lancar setiap hari. Dari ketiga produsen ini, kita dapat memahami bahwa produsen biodiesel punya komitmen tinggi dalam mendukung program mandatori B20.

Rubrik Teropong mengangkat tema mengenai kapasitas

produksi biodiesel yang diperkirakan mencapai 11 juta ton pada tahun depan. Jumlah sebesar ini tidak sebanding dengan angka penyerapan biodiesel sekitar 2,5 juta ton pada tahun ini. Perluasan pemakaian biodiesel diharapkan mampu menjadi jawaban terutama untuk konsumsi solar non subsidi (Non-PSO). Apabila, konsumsi solar non subsidi dapat ditingkatkan harapannya penyerapan mampu mencapai angka 6 juta ton.

Pembaca, kami harapkan buletin Bioenergi membantu penyebaran informasi positif mengenai peranan biodiesel kepada negara ini. Kami harapkan dukungan masyarakat terhadap industri biodiesel dapat terus meningkat dan memahami pentingnya kehadiran industri bioenergi. Selamat membaca.



## 16 Produsen Ditunjuk Pengadaan Biodiesel Periode November 2016-April 2017



foto : gaikindo

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) menetapkan pengadaan biodiesel periode November 2016-April 2017 berjumlah 1,53 juta

KI untuk 16 produsen. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan ESDM bernomor 637 K/12/DJE/2016 Tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan Alokasi Besaran Volumennya Untuk Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Pada PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk periode November 2016-April 2017.

Dalam beleid yang ditetapkan per 26 Oktober 2016 ini disebutkan pengadaan biodiesel kepada PT Pertamina (Persero) sebanyak 1,509 juta KI dan 21 ribu KI kepada PT AKR Corporindo Tbk. Dengan begitu, total pengadaan menjadi 1,53 juta KI.

Penyalur biodiesel ke PT Pertamina (Persero) dari November 2016 sampai April 2017 adalah PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri (Permata Hijau Grup), PT Ciliandra Perkasa, PT Musim Mas, PT Darmex Biofuels, PT Energi Baharu Lestari, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Bayas Biofuels, PT LDC Indonesia, PT Smart Tbk, PT Tunas Baru Lampung Tbk, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Inti Benua Perkasatama, dan PT Batara Elok Semesta Terpadu.

Sementara itu, enam produsen ditunjuk memasok biodiesel kepada PT AKR Corporindo Tbk pada periode ini. Naik dari periode Mei 2016-Oktober 2016 berjumlah 4 produsen. Pemasok untuk periode ini sampai tahun depan adalah PT Musim Mas, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT LDC Indonesia, PT SMART Tbk, dan PT Tunas Baru Lampung Tbk. (sumber:sawitindonesia.com)

## Pungutan Anti Dumping Biodiesel Dibatalkan

JAKARTA - Kabar gembira diterima kalangan produsen biodiesel Indonesia dan Argentina pasca keputusan pengadilan Uni Eropa yang membatalkan pungutan antidumping terhadap produk biodiesel dari minyak kelapa sawit diimpor dari Indonesia dan minyak kedelai dari Argentina.

Direktur Utama BPDP Bayu Krisnamurthi menyampaikan ketetapan tersebut merupakan sentimen positif bagi minyak kelapa sawit asal Indonesia, yang diyakini akan mengerek ekspor komoditas tersebut ke Benua Biru.

Pada 2013 Uni Eropa terapkan antidumping duty karena mereka menuduh kita melakukan dumping. Mereka tetapkan bea masuk untuk produk Indonesia 18,9% dan Argentina 24,6%.

"Setelah ditinjau pengadilan, 16 September kemarin keputusannya keluar, yang menyatakan Indonesia dan Argentina tidak melakukan dumping sehingga tidak boleh dikenakan antidumping duty," ujar Bayu di Jakarta, Senin (3/10). (Sumber: bisnis.com)

## Asosiasi Sawit Kampanye Positif Sawit di Jambore Nasional Pramuka

JAKARTA – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) didukung oleh BDPKKS mengedukasi peserta Jambore Nasional Pramuka mengenai kelapa sawit yang berlokasi di Bumi Perkemahan



foto : istimewa

Cibubur, Jakarta Timur. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI, mengatakan dalam kegiatan jambore terdapat sesi yang membahas kelapa sawit. Di sesi ini, peserta Jambore Nasional (Jamnas) X Pramuka memperoleh informasi aspek positif kelapa sawit dari para Pramuka Senior.

"Sebelum Jambore Nasional berlangsung, saya mentoring beberapa pramuka senior untuk mempresentasikan informasi positif terkait kelapa sawit kepada peserta," ujarnya.

Antusiasme peserta Jambore Nasional Pramuka sangatlah tinggi terhadap sesi sawit. Ini terbukti dari target 2.400 peserta, sampai hari terakhir jumlah peserta yang terlibat mencapai 4.800 orang. Peserta jambore berjumlah 22 ribu anak dan Pembina. Banyak peserta dan Pembina yang berkunjung ke pameran DMSI tersebut.

Paulus mengatakan edukasi ini sangatlah penting bagi anak-anak sedari kecil untuk mengkampanyekan sawit. Dengan cara ini, mereka akan mengenal apa itu kelapa sawit dan punya motivasi untuk belajar sawit sampai perguruan tinggi.

Kegiatan Jamnas Pramuka, dikatakan Paulus, menjadi kesempatan untuk mencegah berkembangnya kampanye negatif sawit. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan informasi berimbang mengenai manfaat kelapa sawit bagi kehidupan masyarakat dan negara.

## Aliansi Negara Eropa Berkomitmen Dukung Penggunaan CPO

JAKARTA – Beberapa negara Eropa yang tergabung dalam The European Palm Oil Alliance mendukung produksi minyak sawit berkelanjutan dan sertifikasi minyak sawit di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan sejumlah negara antara lain Belanda, Perancis, Polandia dan Inggris dalam Palm Oil Stakeholders Meeting di Pekanbaru, Riau, pada awal November.

Dalam pertemuan itu, para pemangku kepentingan sawit seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Apkasindo dan Pemerintah Provinsi Riau hadir untuk memberi masukan.

Programme Manager Palm Oil Alliance EU Margot Logman mengatakan, persoalan yang dihadapi setiap negara di Eropa terkait kampanye negatif sawit adalah berbeda. Isu yang dipersoalkan ada yang mengenai aspek kesehatan dan lingkungan.

Sebenarnya, dukungan Eropa terhadap pemanfaatan minyak nabati Indonesia saat ini cukup baik, tambahnya, dan pihaknya banyak melakukan kerja sama dengan banyak asosiasi seperti federasi minyak nabati Eropa, asosiasi margarine serta kementerian perekonomian di sejumlah Negara Eropa. (Sumber: Antara)

PT Louis Dreyfus Company Indonesia

# MENJADI BAGIAN KESUKSESAN MANDATORI BIODIESEL

Ibarat gula, program mandatori biodiesel Indonesia menjadi penarik investasi baru di sektor ini. Salah satunya PT Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia yang termasuk pemain baru biodiesel di Indonesia. Resmi beroperasi April 2016, pabrik yang dibangun berkapasitas terpasang 420 ribu ton per tahun.



"Kami ingin mendukung pemerintah Indonesia dalam penerapan program mandatori biodiesel," kata

Imran Jehangir

Nasrullah, Presiden Direktur PT Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia.

Menurutnya, pendirian pabrik biodiesel ini menjadi upaya perusahaan untuk mensukseskan mandatori biodiesel di Indonesia. Pemakaian biodiesel menjadi sumber energi terbarukan sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia dalam upaya membangun ketahanan energi.

"Selain itu, biodiesel dapat

mengurangi emisi gas rumah kaca dan secara aktif mendorong pertumbuhan jangka panjang sektor penting di Indonesia seperti kelapa sawit," ujarnya.

Tidak tanggung-tanggung, pabrik biodiesel yang dibangun LDC berkapasitas terpasang 420 ribu ton per tahun. Di Indonesia, pabrik yang berlokasi di Lampung ini adalah pabrik pertama Louis Dreyfus Company (LDC), induk PT LDC Indonesia, untuk kawasan Asia.

LDC sudah berpengalaman luas dalam menghasilkan biodiesel dan pada khususnya perdagangan komoditas. LDC punya empat fasilitas produksi biodiesel di seluruh dunia antara lain dua unit di Lagos (Argentina) berkapasitas 1800 metrik ton per hari, Wittenburg (Jerman) berkapasitas 600 metrik ton per

hari, dan Claypool (Amerika Serikat) kapasitas 900 metrik ton per hari.

"Pabrik biodiesel di Indonesia adalah pabrik kelima Louis Dreyfus di seluruh dunia. Kami telah berpengalaman di bisnis ini. Bisnis kami sudah berjalan di banyak negara. Tetapi kami lebih bangga berada di sini (Indonesia)," kata Imran.

Imran menjelaskan ada empat faktor yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan pabrik biodiesel di Indonesia. Yaitu komitmen kuat mandatori, skala ekonomi, iklim yang baik, dan pengalaman terbaik perusahaan.

Di Indonesia, pabrik biodiesel LDC mengambil lokasi di Provinsi Lampung. Tidak jauh dari pabrik biodiesel ini terdapat kilang sawit terintegrasi milik LDC di Lampung yang beroperasi dari tahun 2014. Total luasan kedua kompleks ini 15.000 meter persegi, dengan jumlah pekerja lebih dari 100 karyawan.

"Alasan kami dekat dengan kilang sawit LDC supaya bisa memaksimalkan skala ekonomi. Daerah Sumatera seperti kita tahu provinsi utama produksi kelapa sawit di Indonesia," kata Imran.

Pertimbangan lainnya, kata Imran, pemerintah Indonesia menerima dengan baik investor yang menanamkan modal di sektor biodiesel seperti LDC. "Saat ini iklim investasi sangat bagus untuk mendukung program mandatori," tuturnya.

Selain menghasilkan biodiesel, pabrik ini memproduksi *glycerin* sebanyak 50.000 ton per tahun. Imran menjelaskan bahwa teknologi transesterifikasi berkelas dunia dan berstandar tertinggi untuk memasok permintaan domestik.

Komitmen kuat LDC dalam bisnis biodieselnnya membuat perusahaan langsung ditunjuk sebagai mitra PT Pertamina untuk pengadaan biodiesel bersubsidi. Perusahaan mendapatkan alokasi sebanyak 76.274 KL untuk pengadaan Pertamina. Pasokan ditujukan ke daerah Lampung dan Maluku. Sementara itu, pengadaan kepada PT AKR Corporindo berjumlah 840 KI dari periode April-Oktober 2016. Saat ini permintaan biodiesel LDC lebih banyak dari pengadaan biodiesel bersubsidi.

Untuk mendukung keberlangsungan pasokan, perusahaan mengoperasikan tanki penimbunan dan pelabuhan berkapasitas 105.000 ton. Di samping itu, ada pula 6 jalur pipa dengan volume sebesar 350 ton per jam untuk memompa produk dari kawasan pabrik terintegrasi ke fasilitas loading. "Fasilitas ini memperkuat posisi LDC sebagai

pemain biodiesel yang dapat memenuhi kebutuhan pasar ekspor internasional," jelasnya.

Di wilayah lain di Indonesia, Grup LDC mengoperasikan sebuah kompleks kilang minyak dengan fasilitas penimbunan dan pelabuhan laut melalui perusahaan patungan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Keberadaan kilang minyak ini, aset-aset logistik dan saat ini ditambah dengan pabrik biodiesel, LDC menguatkan kehadirannya sebagai pemain utama di industri hilir sawit Indonesia.

Imran Nasrullah mengapresiasi program mandatori di Indonesia yang berjalan cepat dan sangat agresif. Kewajiban penggunaan biodiesel di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara lain sebagai contoh di Malaysia baru 8% dan kawasan Uni Eropa sekitar 7 persen.

"Indonesia harus bangga dengan pencapaian mandatori biodiesel ini. Itu sebabnya, kami terus melanjutkan dukungan LDC terhadap program ini di masa depan" ujarnya.

Dari aspek lingkungan, perusahaan berkomitmen pencarian sumber bahan baku berkelanjutan. Terutama sumberbahan baku yang telah

**"Biodiesel yang kami jual ke pasar domestik di Indonesia sangat berkualitas tinggi. Karena kami sudah punya pengalaman lebih baik dan teknologi terbagus," kata Imran Nasrullah sambil tersenyum."**

sesuai standar internasional dari RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dengan sertifikasi RSPO atas dua kilang minyak LDC di Lampung dan Balikpapan. Selain itu, operasi kelapa sawit LDC telah sesuai dengan persyaratan yang diberikan RED (Renewable Energy Directive) dan ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification). Grup LDC juga bekerja sama dengan The Forest Trust (TFT) dalam melakukan kajian komprehensif atas rantai pasokan LDC untuk memastikan akuntabilitas tertinggi pemasok dan rekam jejak produk. (\*)



**J**ummy Bismar Martua Sinaga, Bio Commercial Manager PT Cemerlang Energi Perkasa, menyebutkan pengadaan biodiesel bersubsidi dapat tercapai 100% dari Mei ke Oktober 2016. Pencapaian ini berkat kerjasama yang baik antara PT Cemerlang Energi Perkasa dengan mitranya PT Pertamina sebagai *offtaker* biodiesel bersubsidi.

“Kami bersyukur selama ini Pertamina sangat kooperatif. Mereka memberikan informasi stok di deponya minimal sebulan sebelum pengiriman. Mengingat lokasi pabrik kami jauh dari wilayah pengiriman,” kata Jummy dalam wawancara di awal Oktober.

PT Cemerlang Energi Perkasa ditunjuk Pertamina untuk menyalurkan biodiesel sebanyak 78.292 Kl. Wilayah distribusi meliputi Tanjung Gerem (Banten), Donggala (Sulawesi Tengah), Tembilahan (Riau), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bernomor 258 K/12/DJE/2016 mengenai penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Alokasi Besaran Volume Untuk Pengadaan BBN Jenis Biodiesel di PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Periode Mei-Oktober 2016.

Menurut Jummy, perusahaan menggandeng perusahaan transportasi laut untuk memastikan pengiriman biodiesel tidak terlambat. Ada 10 kapal terdiri dari kapal tongkang tanker yang bekerja penuh waktu untuk menjaga pasokan ke depo Pertamina. Armada kapal ini bergerak estafet.

“Jadi, satu kapal sudah selesai bongkar muat di depo. Kapal lain ada yang sudah bergerak menuju depo yang sama. Dengan begitu, stok biodiesel di depo tetap



PT Cemerlang Energi Perkasa

# MEMBANGUN SINERGI BAIK DENGAN PERTAMINA

**Pengadaan biodiesel PT Cemerlang Energi Perkasa (CEP) ke Pertamina dapat berjalan sesuai target. Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan fasilitas dan unit transportasi perusahaan untuk mendukung program mandatori.**

**“Kami bersyukur selama ini Pertamina sangat kooperatif. Mereka memberikan informasi stok di deponya minimal sebulan sebelum pengiriman. Mengingat lokasi pabrik kami jauh dari wilayah pengiriman,” kata Jummy Sinaga dalam wawancara di awal Oktober**

tersedia,” jelas Jummy.

Tantangan utama adalah cuaca. Menurut Jummy, cuaca terkadang menghambat jadwal pengiriman. Akibatnya, distribusi menjadi terlambat dari waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, pengiriman ke daerah Kupang yang melewati Laut Jawa dan Laut Flores kadang terhambat ombak tinggi. “Cuaca buruk kerap kali terjadi September hingga Desember. Kalau sudah begini biasanya pengiriman akan di-reschedule artinya diantisipasi dengan mempertimbangkan waktu perjalanan lebih lama namun stock di depo tidak terganggu,” tambahnya.

PT Cemerlang Energi Perkasa adalah anak usaha Apical Group Ltd adalah salah satu eksportir terbesar minyak mentah sawit (CPO) dan diproses kelapa sawit



(PPO) di Indonesia. Dalam situsnya disebutkan Apical mengoperasikan empat kilang, satu pabrik biodiesel dan pabrik *crushing kernel* yang berada di Indonesia dan China.

Sementara itu, Apical meresmikan pabrik biodiesel PT Cemerlang Energi Perkasa (CEP) semenjak November 2008. Berdirinya PT CEP bertujuan ingin mendukung pemerintah dalam implementasi sektor energi baru dan terbarukan. Pendirian pabrik ini tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

"Tujuan dari terbitnya permen 32 tahun 2008 sangat mulia untuk mengurangi impor solar dan meningkatkan devisa negara," jelasnya. Lebih jauh lagi, kata Jummy, perusahaan tidak sebatas melihat dari aspek bisnis semata. Melainkan ingin membantu pemerintah untuk menciptakan udara dan lingkungan yang bersih.



"Kami ingin menjadi bagian dan berpartisipasi dalam mensukseskan program mandatori," imbuhnya.

Hingga tahun ini, kapasitas terpasang pengolahan PT CEP sebanyak 600 ribu ton per tahun. Ada tiga line produksi yang masing-masing berkapasitas 200 ribu ton per tahun. Pabrik yang berlokasi di Lubuk Gaung, Dumai Provinsi Riau ini mendapatkan dukungan fasilitas modern seperti *private jetty* dengan draft 14 m dan dapat disandarin kapal dengan DWT 50.000 mt dan memenuhi ISPS Code (The International Ship and Port Facility Security Code) yang dimiliki perusahaan afiliasi PT Sari Dumai Sejahtera. Fasilitas lain seperti tanki penyimpanan berjumlah 41.600 ribu ton dan tanki pendukung 19.500 ton untuk menampung hasil produksi yang akan didistribusikan kepada konsumen.

#### **Berharap kepada mandatori**

Di awal pabrik beroperasi, kata Jummy, penjualan biodiesel masih bisa ditujukan kepada pasar ekspor dan domestik. Namun setelah harga minyak bumi turun drastis semenjak awal tahun 2015 berpengaruh kepada penjualan ekspor perusahaan. Di pasar ekspor, selisih antara harga biodiesel dan minyak fosil antara Rp 3.600-Rp4.000 per liter.

Jummy menjelaskan bahwa produksi biodiesel perusahaan lebih banyak diserap untuk kepentingan subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Sekitar 70% ditujukan kepada Pertamina (PSO) dan sisanya sekitar 30%

diserap kepentingan non subsidi (Non PSO).

Dengan menggantungkan penjualan biodiesel kepada sektor subsidi, maka kapasitas produksi yang bisa terpakai (utilisasi) sekitar 30%-40%. "Line produksi kami yang beroperasi sebanyak dua line karena market lagi lesu. Di dalam negeri, biodiesel bersubsidi masih ditopang pungutan ekspor," tambahnya.

Kalangan sektor industri biodiesel menyambut kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemakaian biodiesel. Menurut Jummy, kebijakan ini dapat meningkatkan porsi pemakaian biodiesel. Berdasarkan penelitian Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), pencampuran biodiesel dapat mencapai 30% atau B30.

Dalam hal ini, Jummy optimis mandatori dapat berjalan baik berdasarkan dari perkembangan mandatori B20 sekarang ini. Mandatori B20 yang digunakan sektor transportasi sudah mencapai 3 juta Kl. Peningkatan mandatori menjadi B30 akan berdampak baik kepada industri seiring dengan bertambahnya konsumsi.

"Kami yakin dan percaya pemerintahan Jokowi sukses menjalankan mandatori. Karena, Indonesia punya sumber daya kuat di energi terbarukan. Dalam hal ini, Indonesia sangat signifikan dalam pemakaian biodiesel dibandingkan negara lain," pungkas Jummy. (\*)



PT Tunas Baru Lampung Tbk

## SIAP PENUHI KEBUTUHAN PENGGUNA BIODIESEL

PT Tunas Baru Lampung Tbk dari tahun lalu sudah mengoperasikan pabrik biodiesel yang berlokasi di Lampung. Pabrik ini berkapasitas 400 ribu ton per tahun.

Berdirinya pabrik biodiesel PT Tunas Baru Lampung Tbk tidak terlepas dari janji pemerintah untuk menerapkan kewajiban pencampura biodiesel sebesar 15% atau dikenal B15. Semenjak dua tahun lalu, anak usaha Sungai Budi Grup ini melihat peluang menjanjikan dalam bisnis biodiesel.

Pembangunan pabrik biodieselnnya sudah berjalan dari tahun 2015. Sapto Tranggono, Advisor pabrik biodiesel PT Tunas Baru Lampung, menyebutkan kapasitas terpasang pabrik berjumlah 1.150 ton per hari. Dalam satu tahun, kemampuan produksi dapat mencapai 400 ribu ton.

Menurut Sapto, berdirinya pabrik biodiesel karena penggunaan energi fosil mengalami penurunan. Sementara itu, tren sektor energi terbarukan menunjukkan tren peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan tidak ingin ketinggalan dari sisi riset dan bisnis di sektor energi terbarukan.

"Pabrik mulai *commisioning* pada Januari 2016. Lalu bulan Aprilnya sudah dipercaya untuk suplai biodiesel," kata Sapto.

Pada periode pengadaan Mei 2016-Oktobre 2016, PT Tunas Baru Lampung Tbk mendapatkan jatah pasokan 51.753 KL. Wilayah pengadaan ke daerah Pulau Baai, Kertapati, Lahat, Baturaja, Lubuk Linggau. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bernomor 258 K/12/DJE/2016.

Pada periode November 2016-April 2017 berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 673/2016, pengadaan biodiesel PT Tunas Baru Lampung Tbk kepada Pertamina mencapai 65.905 KL untuk daerah Panjang dan Kertapati. Produksi biodiesel perusahaan juga diminta memasok biodiesel kepada PT AKR Corporindo Tbk sebesar 700 KL untuk daerah Lampung.

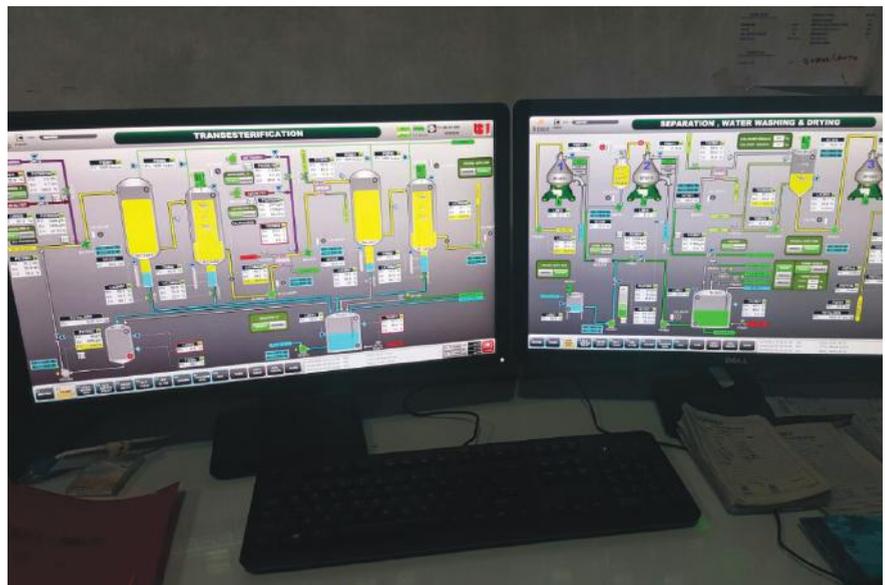
Johan Stanisias Jap, Technical Manager PT Tunas Baru Lampung Tbk, menjelaskan bahwa dengan jumlah produsen yang cukup banyak seperti sekarang maka kapasitas yang sudah terpakai (utilisasi) pabrik baru 30% dari total kapasitas terpasang. Rata-rata satu bulan produksi yang dihasilkan baru 7.500 ton. Produksi biodiesel digunakan untuk menyuplai kontrak pengadaan biodiesel dengan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk.

Lebih lanjut kata Johan, pihaknya menyambut baik inisiatif pemerintah yang memberlakukan kewajiban pencampuran biodiesel untuk solar non subsidi. Dengan kapasitas yang dimiliki sekarang ini, perusahaan siap untuk memenuhi kebutuhan customer. Sejumlah perusahaan alat berat sedang proses uji coba biodiesel kami. "Memang mereka masih minta sampel. Permintaan ini dilakukan mungkin sebagai persiapan mandatori tadi," ujarnya.

Guna memenuhi kebutuhan di sektor non subsidi seperti manufaktur dan alat berat, PT Tunas Baru Lampung berinovasi menghasilkan biodiesel sesuai kebutuhan pengguna. Menurut Sapto Tranggono, perusahaan tambang sudah ada yang memint biodiesel kualitas winter yang berada dalam suhu empat derajat celcius sampai nol. Sementara itu, biodiesel standar Pertamina di suhu 18 derajat celcius.

Ke depan, kata Sapto, perusahaan biodiesel harus siap menghasilkan biodiesel generasi kedua. Kualitas biodiesel generasi kedua mampu menyamai solar. "Memang harganya lebih mahal apalagi harga CPO bisa dua kali lebih tinggi dari solar," ujar pria lulusan Institut Teknologi Bandung ini.

Sapto Tranggono menjelaskan tantangan dari industri biodiesel yaitu kesiapan infrastruktur serta logistik. Infrastruktur ini sangatlah



penting dalam pengiriman biodiesel ke sejumlah daerah terutama remote area. Itu sebabnya akan lebih baik bagi pemerintah untuk memperkuat logistik biodiesel di wilayah lain.

"Saya bisa bayangkan kalau program mandatori benar-benar dijalankan. Apalagi, Pertamina meminta pasokan terus jalan dan tidak boleh ada libur suplai. Aturan mainnya memang seperti itu," kata Sapto.

Johan Stanisias mengatakan pengiriman biodiesel Tunas Baru Lampung kepada Pertamina selalu tepat waktu dan tidak pernah terlewat. Untuk pengiriman ke depo Pertamina, perusahaan punya dua kapal yang siap bolak-balik. Ketika satu kapal telah selesai mengirimkan biodiesel di pelabuhan A. Satu kapal sudah siap berangkat menuju pelabuhan A. Tak hanya itu, perusahaan punya tangki penyimpanan berkapasitas 5.000 Kl di Lampung ditambah lagi satu kapal berkapasitas 4.000 Kl sebagai floating tank.

Andaikata terjadi masalah dalam pengiriman laut, kata Johan, perusahaan siap melalui pengiriman jalur darat. "Walaupun perusahaan baru pertama kali terlibat dalam pengadaan biodiesel. Tapi, kami dukung penuh program B20. Makanya, kami siap dari aspek perawatan dan logistik

supaya tidak kena *penalti* dari Pertamina," ujar Johan.

Saat ini, perusahaan sedang menyelesaikan pembangunan tangki timbun berkapasitas 10.000 ton. Fasilitas lainnya yang sedang dibangun berupa dermaga untuk kapal bermuatan sekitar 10.000-12.000 DWT di pabrik biodiesel yang berlokasi di Panjang.

Sapto berpandangan mandatori dapat berjalan baik tidak terlepas dari dukungan subsidi karena harga CPO di atas minyak bumi. Komitmen penuh pemerintah membuktikan Indonesia menjadi negara pertama yang berani terapkan program B20.

Supaya mandatori berjalan lebih baik, disarankan Sapto, supaya dilakukan pengawasan di lapangan. Pengawasan ini dijalankan guna mengetahui kualitas biodiesel yang dikirimkan produsen. Dengan adanya informasi tadi produsen akan memperoleh input positif mengenai kualitas biodieselnnya.

Johan menambahkan perusahaan mengapresiasi mandatori karena program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan pemerintah. "Semoga komitmen pemerintah terus dijaga sehingga sektor energi terbarukan memberikan dampak positif kepada lingkungan dan ekonomi negara," pungkasnya. (\*)



## MANDATORI BIODIESEL JALAN TERCEPAT TURUNKAN EMISI

**Jika konsisten ingin menurunkan emisi global, pemerintah perlu mengajukan proposal penurunan emisi global berbasis mandatori biofuel secara luas. Jika 10 persen saja BBM fosil digantikan biofuel akan menurunkan sekitar 6 persen emisi global setiap tahun**

Pemerintah dan LSM lingkungan dalam forum-forum dunia seharusnya mendukung mandatori biodiesel sawit sebagai salah satu cara tercepat dalam menurunkan emisi global dan termasuk di Indonesia. Seharusnya, target pemerintah untuk menurunkan emisi sebesar 46 persen sebagaimana dijanjikan pada forum internasional dikaitkan dengan mandatori biodiesel.

Sebagaimana laporan *International Energy Agency* (IEA) sekitar 70 persen dari total emisi gas rumah kaca (GRK) dunia adalah dari konsumsi BBM fosil. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang efektif mengurangi emisi GRK global tersebut adalah mengurangi ketergantungan dunia pada energi BBM fosil. Caranya yakni menggantikan BBM fosil

dengan biofuel seperti biodiesel, biopremium, biogas, dan bioavtur.

*European Commission* (2012) sudah mengkajinya. Penggantian solar dengan biodiesel sawit dapat mengurangi 62 persen emisi mesin-mesin diesel. Artinya, bahan bakar yang digunakan mesin-mesin diesel seperti pabrik-pabrik, pembangkit listrik, alat transportasi yang selama ini menggunakan BBM solar fosil, perlu beralih ke penggunaan biodiesel sawit. Sehingga mesin-mesin diesel masih tetap berjalan normal namun tidak lagi menghasilkan emisi yang besar dan mengotori lingkungan seperti selama ini.

Jika 10 persen saja konsumsi BBM fosil global digantikan dengan biofuel, maka emisi global akan turun sekitar 6 persen setiap tahun. Penggantian BBM fosil dengan biofuel tersebut tidak mengurangi

kesejahteraan masyarakat negara-negara maju yang selama ini penghasil emisi terbesar. Bahkan sebaliknya penggantian BBM fosil dengan biofuel sawit justru menambah kesejahteraan mereka sebagaimana studi *European Economic* (2014).

Indonesia termasuk terdepan dalam mengganti BBM solar dengan biodiesel sawit melalui kebijakan mandatori biodiesel. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tahun Indonesia mengkonsumsi sekitar 34 juta ton BBM solar fosil dan menghasilkan emisi GRK ke udara bumi. Tahun 2016 Indonesia sedang mengimplementasikan B-20 yakni penggantian BBM solar fosil 20 persen dengan biodiesel sawit. Sehingga diharapkan akan terjadi pengurangan emisi GRK dari konsumsi energi.

Meskipun program mandatori biodiesel di Indonesia masih banyak kekurangan, namun kebijakan tersebut merupakan tercepat dan paling berhasil dibandingkan di negara-negara lain. Bahkan lebih maju dibandingkan dengan negara-negara maju penghasil emisi GRK terbesar dunia yakni seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pengalaman Indonesia tersebut seharusnya ditularkan ke negara-negara lain. Seharusnya pemerintah membawa proposal Pengurangan Emisi Global dengan Mandatori Biofuel Sawit dalam forum-forum internasional termasuk ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bukan ikut-ikutan mengemis dana lingkungan seperti selama ini.

Negara-negara maju penghasil GRK terbesar selama ini harus berani mengalihkan konsumsi BBM fosil ke biofuel antara lain dari minyak sawit. Tidak ada kontribusi yang signifikan pada upaya penurunan emisi global dengan mengalihkan persoalan utama yakni mencari-cari kelemahan produsen sawit dengan logika yang jungkir balik. (Sumber: GAPKI)

# Ignasius Jonan Pimpin Kementerian ESDM

Joko Widodo, Presiden RI, mengangkat Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ke-37. Kepiawaian Jonan dalam bidang manajemen diharapkan mampu merevitalisasi sektor energi

Dalam pelantikan pada 14 Oktober 2016 di Istana Negara, Joko Widodo, meminta pengangkatan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Archandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidak ditarik kepada isu personal dan politik.

"Keduanya adalah figur yang cukup profesional, dan berkemampuan untuk melakukan reformasi di sektor ESDM. Ini isu manajemen," tegas Jokowi.

Pengangkatan Ignasius Jonan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019.

Di Kabinet Kerja, Ignasius Jonan sempat menjabat Menteri Perhubungan dari tanggal 26 Oktober 2014 sampai

27 Juli 2016. Jabatannya kemudian digantikan oleh Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan.

Dalam bidang manajemen, Ignasius Jonan sangatlah handal dan piawai. Malang melintang di sektor keuangan dan perbankan, pria kelahiran Singaperbangsa Karawang ini diminta Sofyan Djalil, Menteri BUMN, untuk membenahi PT Kereta Api Indonesia (KAI). Ignasius Jonan mampu mendongkrak laba PT KAI menjadi Rp 154,8 miliar dari sebelumnya rugi Rp 8,5 miliar pada 2008. Pada tahun 2013, bahkan PT KAI mencatatkan laba sebesar Rp 560,4 miliar.

Ignasius Jonan mengatakan *capacity building* merupakan salah satu perhatiannya. Bagi dia hal ini sangat penting, karena Kementerian ESDM merupakan kementerian teknis, sehingga jajarannya harus benar-benar mengerti teknis.

"Sebisa mungkin bekerja berdasarkan apa yang kami pahami," kata Jonan pada pertengahan Oktober seperti dilansir dari *tempo.co*.

Jonan melihat *capacity building* menjadi penting, agar pemahaman soal teknis dimiliki jajaran kementerian. Dia mencontohkan, jangan sampai seperti pemegang gelar doktor di bidang perkeretaapian, namun tidak

bisa mengoperasikan sebuah kereta.

Kemudian, Jonan juga menyinggung soal proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Dia menuturkan yang dimaksudkan dari target proyek itu adalah *electricity coverage*, yang saat ini angkanya baru 85 persen. Target nanti sampai 95 persen dalam hal *electricity coverage*.

Di sektor Migas, Jonan mengungkapkan diskusi yang sedang hangat adalah soal penggunaan teknologi dan soal *cost recovery*. Soal *cost recovery*, Jonan mengaku mendapatkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, agar harus ada asas keadilan.

Dalam acara Bincang Sektor ESDM pada 3 November 2016 di Gedung ESDM, Ignasius Jonan mengatakan harga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) harus didiskusikan bersama-sama dengan PLN. "Kita duduk sama-sama dengan PLN kalau harganya terlalu tinggi atau rendah. Nanti kita lihat lagi," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Ignasius Jonan menanggapi keluhan dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagaimana ditulis laman *ebtke.esdm.go.id*.

Jonan juga menegaskan Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di sektor ESDM. Diperlukan partisipasi seluruh pihak dalam pengelolaan dan perusahaan sektor ESDM. Untuk itu tidak boleh ada yang menghambat pelaksanaan di lapangannya. "Kita tidak boleh menghambat investasi, sistem harus lebih responsif terhadap perubahan pasar dan zaman," pungkasnya. (\*)



# APROBI Apresiasi Terbitnya PERMEN ESDM NO.26/2016

Pada Pertengahan Oktober 2016, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Dalam aturan baru ini, tidak ada lagi perbedaan antara biosolar subsidi dan nonsubsidi.

**B**eleid ini tidak lagi membuat penggolongan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu yang masuk sebagai penerima subsidi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2015. Oleh karena itu, semua solar yang dicampur biodiesel akan menerima subsidi dari pungutan ekspor yang dihimpun serta dikelola oleh BPDP Kelapa Sawit.

Lalu, mengapa tidak ada lagi perbedaan antara biosolar subsidi dan non subsidi? Sebab dalam Permen ESDM Nomor 26/2016 tidak ada lagi definisi Jenis BBM Tertentu. Pengertian kata “tertentu” inilah yang menetapkan bahan bakar minyak/solar masuk kategori solar bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang wajib dicampur biodiesel sebesar 20% sesuai program mandatori.

“Dalam permen sebelumnya (red-Peraturan Menteri ESDM Nomor 29/2015), ada pengertian BBM tertentu ditujukan solar bersubsidi atau PSO,” ujar Togar Sitanggang, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI).

Di Permen ESDM Nomor 29/2015 memang tertera pengertian Jenis BBM tertentu yaitu *bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah minyak bumi telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.*

Menurut Togar Sitanggang, hilangnya definisi “Jenis BBM Tertentu” dalam Permen ESDM Nomor 26/2016 merujuk kepada landasan hukum di atasnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 24/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Akibat tidak adanya kata “tertentu” di Perpres 24 tadi. Maka hilang juga definisi tadi di permen 26 karena peraturan menteri itu turunan dari peraturan presiden,” jelas Togar.



Aturan baru yang menyamaratakan semua jenis biodiesel ini mendapatkan kebijakan positif produsen biodiesel di Tanah Air. Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mendukung beleid anyar ini karena dinilai dapat mempercepat proses program pencampuran 20% biodiesel dalam bahan bakar solar atau B-20 yang sudah digagas mulai tahun ini hingga 2019 mendatang.

"Kami mendukung regulasi ini dengan karena dapat meningkatkan konsumsi biodiesel di dalam negeri," kata Paulus Tjakrawan.

Namun, Paulus bilang beleid baru ini belum bisa dijalankan di lapangan karena belum ada penjelasan secara rinci terkait pembayaran subsidi untuk solar yang selama ini masuk kategori solar non subsidi. "Kami masih mempertanyakan pembayaran untuk biodiesel yang selama ini nonsubsidi tersebut," ujarnya sebagaimana dilansir dari *Harian Kontan*.

Untuk itu, Paulus meminta diterbitkan aturan teknis lanjutan dari beleid tersebut agar tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi produsen biodiesel. Pasalnya, selama ini biodiesel pada solar nonsubsidi disalurkan langsung kepada industri pengguna dan tak melalui Pertamina atau AKR Corporindo selaku penyalur solar subsidi ke masyarakat yang memiliki kontrak perjanjian selama enam bulan.

Paulus bilang harga biodiesel yang selalu berubah-ubah setiap

hari mengikuti perkembangan harga minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) harus memiliki patokan yang jelas. Sedangkan biodiesel yang dijual untuk solar nonsubsidi biasanya dilakukan dengan business to business dengan melihat perkembangan harga terkini.

Ditambahkan Paulus, pihaknya meminta supaya pemerintah menghapus ketentuan soal kewajiban bagi produsen

**Sekarang sudah ada sistem pinalti kepada sektor non subsidi dan subsidi, bagi yang tidak menjalankannya. Itu mekanismenya seperti apa harus diperjelas juga," terang Paulus.**

biodiesel untuk mencari sendiri pembeli biodiesel yang akan mencampurnya ke dalam solar yang selama ini masuk kategori nonsubsidi. Dia menilai aturan ini menjadi tak lagi relevan karena ketentuan soal solar subsidi dan nonsubsidi untuk pengguna biodiesel sudah dihapus.

Seharusnya, pemerintah konsisten untuk menerapkan sistem penunjukan langsung secara transparan bagi produsen biodiesel untuk menyalurkan biodiesel yang sebelumnya masuk kategori subsidi ke wilayah pelosok yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dari pihak BPDP Kelapa Sawit yang diwakili Bayu Krisnamurthi,

Direktur Utama, mengatakan pemberlakuan aturan ini kendati sudah diundangkan tetapi implementasinya belum berjalan. Sampai Oktober, BPDP Kelapa Sawit baru mengeluarkan subsidi biodiesel untuk solar Public Service Obligation (PSO) dan yang diserap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Lebih lanjut kata Bayu, lembaganya belum membuat perhitungan dampak kenaikan subsidi jika aturan ini sudah benar-benar terlaksana. Saat ini dalam sebulan BPDP Kelapa Sawit mengalokasikan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan untuk subsidi biodiesel.

Guna mempermudah pelaksanaan Permen ESDM 26/2016, ada sejumlah aturan teknis yang perlu cepat diselesaikan. Pertama, pemerintah harus berhati-hati dalam penunjukan tim evaluasi. Tim ini mestinya bersifat netral dan menguasai masalah.

Kedua, perlu peraturan dirjen atau petunjuk pelaksana teknis Permen No.26/2016. Karena subsidi biodiesel bersumber dari pungutan ekspor pihak swasta yang menjadi uang negara. "Jadi perlu ada mekanisme pemilihan dan penunjukan badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) yang rinci dan detail," kata Paulus.

Selain itu, pemerintah sebaiknya memperjelas mekanisme pembayaran subsidi ke depannya. Paulus meminta dilakukan sosialisasi kepada pihak badan usaha BBN. "Sekarang sudah ada sistem pinalti kepada sektor non subsidi dan subsidi, bagi yang tidak menjalankannya. Itu mekanismenya seperti apa harus diperjelas juga," terang Paulus.

Setelah terbitnya aturan ini yang tidak lagi membedakan solar subsidi dan non subsidi, diperkirakan konsumsi biosolar domestik mencapai angka 6 juta Kl. Untuk tahun ini, rata-rata konsumsi sekitar 2,6 juta Kl. (\*)

# PASOKAN BIODIESEL BANJIRI PASAR DOMESTIK

Kapasitas terpasang industri biodiesel tahun depan diperkirakan 11 juta ton. Kalangan produsen masih bergantung dari penggunaan solar bersubsidi. Sementara itu, belum ada kejelasan dari sektor solar non subsidi. Pemerintah diminta memperluas pencampuran biodiesel untuk non subsidi.

Togar Sitanggang, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menjelaskan bahwa kapasitas terpasang produksi biodiesel akan meningkat lagi untuk tahun depan. Saat ini, dari jumlah kapasitas produksi yang ada (eksisting) telah mencapai sekira 9 juta ton. Jumlah ini akan naik menjadi 11 juta ton dengan adanya tambahan empat pabrik biodiesel baru pada 2017.

Dalam catatan asosiasi, kata Togar, produsen yang membangun pabrik tadi antara lain Best Agro, Darmex Grup, dan Sinarmas Agro. "Ada satu perusahaan lagi yang bangun pabrik di Balikpapan. Tapi saya belum tahu detail nama perusahaan tersebut," kata Togar dalam wawancara pada Oktober kemarin.

Togar menyayangkan penambahan produksi tahun depan belum dibarengi dengan optimalisasi penggunaan biodiesel di pasar lokal. Konsumsi biodiesel tahun ini saja maksimal 2,5 juta ton termasuk Non Public Service Obligation (PSO atau subsidi). Pemakaian biodiesel dominan untuk solar bersubsidi di sektor transportasi.

"Konsumsi biodiesel dalam negeri akan bertahan 2,5 juta ton. Dengan tingginya kapasitas produksi ini berarti over suplai biodiesel kita. Yang sangat memprihatinkan serapan non-PSO sangat rendah," ujarnya.

Togar mengatakan sulit memahami mengapa penyerapan biodiesel untuk solar non subsidi terbilang rendah. Walaupun,

pangkal masalahnya akibat dari ketidakseriusan Pertamina. Namun Pertamina punya jawaban sendiri kenapa serapan non PSO kecil. "Jadi, masalahnya muter-muter disitu saja antara EBTKE, Pertamina dan produsen," ujarnya.

Penyerapan biodiesel dari pembangkit listrik terutama PT PLN juga belum optimal. Togar menjelaskan kalangan produsen telah menerima surat dari pihak PLN yang menerangkan bahwa pembangkit listriknya tidak bisa memakai biodiesel. Masalah ini sudah dilaporkan kepada pihak EBTKE. Oleh karena itu, Togar meminta pemerintah dapat menjadi wasit untuk masalah ini.

"Dalam hal ini, bukan salah produsen tidak menjalankan mandatori di sektor listrik," kata Togar.

Tidak optimalnya penyerapan biodiesel di sektor non PSO menjadi perhatian pemerintah. Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, telah memanggil Rida Mulyana selaku Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi Kementerian ESDM yang menugaskan peningkatan campuran biodiesel pada solar non subsidi.

Dalam keterangannya, Rida Mulyana mengatakan pihaknya diminta supaya mengintensifkan penggunaan biodiesel untuk solar non PSO. "Jadi kami ngelaporin saja memang ada tugs bagaimana non PSO diintensifkan tanpa menambah subsidi. Itu yang ditugaskan beliau (Luhut) untuk

dikaji, ekuilibriumnya seperti apa," kata Rida seperti dikutip dari sejumlah media.

Rida mengatakan perlu pertimbangan mendalam dalam penerapan kebijakan ini. Sebab akan ada potensi kenaikan harga yang pada akhirnya berdampak kepada industri yang banyak memakai solar. "Memang produsen CPO ingin bisa berjalan. Apabila dipaksakan membuat harga solar non PSO menjadi naik sehingga kurang kompetitif industrinya, jadi *gak* laku. Keseimbangannya harus dikaji ulang," jelas Rida.

Pada bulan Oktober, pemerintah merencanakan pencampuran solar non subsidi dengan biodiesel diwajibkan per 1 November 2016. Kewajiban ini mampu meningkatkan penyerapan biodiesel sebesar 2,5 juta kiloliter dalam satu tahun ke depan.

Nantinya, solar non subsidi direncanakan menerima perlakuan sama dengan solar bersubsidi dari sisi pembayaran subsidi. Jadi, harga solar non-subsidi mendapatkan subsidi dari dana pungutan ekspor minyak sawit (CPO Fund).

Menurut Rida pungutan ekspor CPO tahun depan diperkirakan bisa naik seiring dengan pertumbuhan ekspor produk sawit. Walaupun demikian belum ada rencana untuk mengerek nilai pungutan ekspor CPO dan produknya. Besar pungutan tetap mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133 tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana



foto : trucktrend.com

Perkebunan.

“Untuk sekarang ini tetap satuan (pungutannya) tetapi pernah kami meng-*exercise*, bagaimana jika satuan pungutan dikurangi atau ditambah. Banyak asumsi untuk kalkulasi itu, seperti volume, pungutannya, serapannya, dan lain-lain,” ujarnya.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Aprobi, mengatakan apabila solar non PSO dicampur biodiesel sebaiknya perhitungan subsidi tidak lagi dibebankan kepada pengusaha biodiesel. Beban subsidi bisa ditanggung bersama antara pemerintah, pelaku industri, masyarakat dan BPDP. Tidak bisa seterusnya subsidi bergantung kepada pungutan ekspor yang dikutip dari produsen sawit hulu dan hilir.

“Saat ini mungkin bisa skema pungutan ekspor sawit dipakai. Tapi ini tidak akan bisa berkepanjangan,” jelasnya.

Terkait subsidi, menurut Paulus, menyangkan pernyataan

sejumlah anggota DPR RI bidang energi. Paulus mengatakan anggota DPR sering katakan mengapa harus subsidi pengusaha biodiesel. Dari pernyataan ini menunjukkan anggota DPR tidak punya pemahaman baik karena subsidi itu untuk rakyat supaya dapat memakai energi terbarukan.

Sebagai perbandingannya, ketika pemerintah mengalokasikan subsidi energi minyak fosil sampai Rp 200 triliun. Tetapi, kata Paulus, tidak ada satupun anggota DPR yang meminta penghapusan subsidi tadi. Padahal subsidi ini digunakan untuk membayar BBM yang diimpor dari luar negeri.

“Sementara ketika subsidi diberikan kepada pengusaha biodiesel domestik tapi mereka tolak. Inikan sesat pikir, tidak benar itu. Kalau subsidi BBM diberikan ke luar negeri itu dikatakan untuk rakyat. Mengapa ketika subsidi biodiesel diberikan kepada pengusaha Indonesia. Malahan dikatakan subsidi bukan untuk

rakyat,” keluh Paulus.

### Relaksasi pungutan

Ditengah lesunya pasar ekspor biodiesel, produsen berharap supaya minta pemerintah melonggarkan pungutan ekspor kepada industri biodiesel. Togar Sitanggang mencontohkan pungutan ekspor untuk cangkang sawit bisa diturunkan lalu akan dievaluasi kenaikan pungutan dalam jangka waktu tertentu. Perlakuan sama diharapkan bisa berlaku kepada ekspor biodiesel.

“Kita tahu pasar ekspor tidak terlalu baik. Dengan adanya pungutan membuat *competitiveness* biodiesel Indonesia menjadi rendah,” ujarnya.

Relaksasi pungutan sangatlah penting guna meningkatkan utilisasi produksi biodiesel. Menurut Togar nilai pungutan ekspor bisa diturunkan dari US\$ 20 per ton menjadi US\$ 5 per ton. Harapannya dengan turunnya pungutan bisa mendorong utilisasi dan volume ekspor.

# MORATORIUM KELAPA SAWIT, MENGAPA BUKAN MORATORIUM KONSESI LOGGING?

Penulis: Togar Sitanggang



Beberapa hari yang lalu saya membaca di media online bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan diskusi tahap akhir mengenai moratorium Kelapa Sawit di Indonesia. Di dalam berita tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, dikutip mengatakan bahwa ada 2,3 juta hektare perkebunan Kelapa Sawit yang tidak punya izin yang melakukan konversi dari hutan ke perkebunan Kelapa Sawit. Ibu Menteri juga menyebutkan bahwa ada banyak perkebunan Kelapa Sawit yang belum diusahakan dan mempunyai tutupan hutan yang masih bagus maka kemungkinan izin perusahaan tersebut akan dicabut. Ditambahkan bahwa jika semua ini dilakukan melalui moratorium maka ada jutaan hektar hutan yang bisa diselamatkan.

Industri Kelapa Sawit di Indonesia selalu menjadi *hot issue* dan sangat sexy untuk diberitakan. Sayangnya pemberitaan ini lebih cenderung ke arah hal negatif. Pemberitaan Kelapa Sawit lebih didominasi dengan topik

penyebab kebakaran hutan, punahnya satwa hutan dan tentunya deforestasi. Pemberitaan bahwa industri kelapa sawit menjadi penghasil devisa terbesar negara ini tidak pernah kita baca. 30 sampai 50 juta orang menggantungkan hidupnya ke industri ini juga tidak pernah kita baca.

Di tahun 2012 sudah dilakukan penelitian oleh Petrus Gunarso dkk, yang disupport oleh RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), tentang asal muasal lahan perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian tersebut 43,45% lahan berasal dari lahan terlantar, 26,55% lahan dari *disturbed forest*, 14,4% dari konversi lahan pertanian lain, 12,6% dari tanaman industri dan 3% dari hutan premier.

Mengapa ada 70% lahan terlantar dan *disturbed forest*? Ya, lahan ini adalah bekas konsesi logging yang terjadi di tahun 70-80an. Hutan sudah rusak karena diambil kayunya oleh perusahaan pemegang HPH (Hak Penggunaan Hutan). Lahan ini dibiarkan terlantar bertahun-tahun sebelum ditawarkan

kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Lahan terlantar dan *disturbed forest* dan berubah menjadi hijau kembali oleh pohon-pohon kelapa sawit dan yang tentunya juga menjadi bagian penting dalam perekonomian daerah tersebut dan negara secara umum.

Di awal tulisan ini saya mengutip pernyataan ibu Menteri bahwa Moratorium Kelapa Sawit akan menyelamatkan hutan. Apakah hal ini benar bisa menyelamatkan hutan? Jika kita melihat ke belakang sejarah hutan kita, ada masa dimana terjadi deforestasi besar-besaran demi mendapatkan devisa secara mudah dengan memotong pohon di hutan dan mengirimnya sebagai komoditas ekspor ke negara-negara maju seperti Jepang, Eropa dan Amerika.

Siapa sebenarnya garda terdepan yang merusak hutan?

Kita sering membaca di media adanya pelaku illegal logging yang tertangkap dengan barang bukti kayu. Jika ada illegal logging, pastinya ada legal logging, benar? Ya. Berdasarkan data yang saya dapat dari sebuah Jurnal internasional dengan judul *Relative Contributions of the Logging, Fiber, Oil Palm, and Mining Industries to Forest Loss in Indonesia* oleh Abood dkk disebutkan bahwa Greenpeace menghitung ada 24 juta hektar konsesi logging di Indonesia saat ini dengan sebaran 9 juta hektar di Kalimantan, 1,5 juta hektar di Sumatera, 10,5 juta hektar di Papua, 1,5 juta hektar di Sulawesi dan 1,5 juta hektar di Maluku. Sementara itu di jurnal yang sama disebutkan bahwa total konsesi kebun kelapa sawit adalah 12 juta hektar, hutan tanaman industri 11 juta hektar, pertambangan 4 juta hektar dan konsesi lain 6 juta hektar.

Ada 24 juta hektar hutan di Indonesia saat ini yang secara legal dideforestasi. Jika pemerintah memang ingin melestarikan hutan, mengapa bukan konsesi logging ini yang dimoratorium?

**(Opini Pribadi. Tulisan dimuat pula dalam Kompasiana pada 4 November 2016)**